KEMENTERIAN HUKUMREPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH SUMATERA SELATAN
Jl. Jenderal Sudirman Km.3,5 Palembang
Laman : sumsel.kemenkum.go.id, Pos-el : kanwilsumsel@kemenkum.go.id

Nomor : W.6-PR.04.05-0035 15 April 2026
Sifat : Segera
Lampiran : Satu berkas
Hal : Penyampaian Laporan Monitoring dan Evaluasi Mandiri (self assessment) Triwulan I Capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2026 pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan

Yth. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum
di Jakarta

Dalam rangka Monitoring dan Evaluasi Capaian Perjanjian Kinerja Triwulan I Tahun 2026 Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan, bersama ini dengan hormat kami sampaikan Laporan Monitoring dan Evaluasi Mandiri (self assessment) Triwulan I Capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2026 Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan sebagaimana terlampir.

Demikian, atas perhatian dan perkenan Bapak kami haturkan terima kasih.

Kepala Kantor Wilayah,

Maju Amintas Siburian

Tembusan:
1. Menteri Hukum Republik Indonesia;
2. Wakil Menteri Hukum Republik Indonesia;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum;
4. Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum;
5. Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum;
6. Direktur Jenderal Peraturan dan Perundang-undangan Kementerian Hukum;
7. Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum;
8. Kepala Badan Strategi Kebijakan Kementerian Hukum;
9. Kepala BPSDM Hukum Kementerian Hukum.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi

KEMENTERIAN HUKUM
REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH SUMATERA SELATAN
Jl. Jenderal Sudirman Km.3,5 Palembang
Laman : sumsel.kemenkum.go.id, Pos-el : kanwilsumsel@kemenkum.go.id

LAPORAN
TENTANG
MONITORING DAN EVALUASI MANDIRI (SELF ASSESSMENT) RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TRIWULAN I TAHUN 2026
PADA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM SUMATERA SELATAN

A. PENDAHULUAN

1. Umum

Kinerja merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam *strategic planning* suatu organisasi. Pengukuran kinerja adalah suatu proses penilaian kemajuan pekerjaan terhadap tujuan dan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya, termasuk informasi atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam menghasilkan barang dan jasa; kualitas barang dan jasa; hasil kegiatan dibandingkan dengan maksud yang diinginkan, dan efektivitas tindakan dalam mencapai tujuan. Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai prestasi manajer dan unit organisasi yang dipimpinnya.Pengukuran kinerja sangat penting untuk menilai akuntabilitas organisasi dan manajer dalam pelayanan publik yang lebih baik. Akuntabilitas disini bukan sekedar kemampuan menunjukkan uang publik dibelanjakan, akan tetapi juga meliputi kemampuan menunjukan bahwa uang publik tersebut telah dibelanjakan secara ekonomies, efisien, dan efektif.

Perwujudan *good governance* merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan untuk mencapai tujuan serta cita-cita berbangsa dan bernegara, serta sebagai salah satu upaya meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, dan untuk memantapkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai misi dan tujuan instansi pemerintah. Pemerintahan yang baik akan terwujud apabila penyelenggaraannya menerapkan prinsip-prinsip profesionalisme, akuntabilitas, transparansi, pelayanan prima, demokratisasi, efisiensi, efektivitas dan penegakan supremasi hukum.

Kementerian Hukum Republik Indonesia memiliki tugas pokok menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan di bidang Hukum. Untuk itu, dalam konteks perwujudan visi dan misi serta tujuan Kementerian Hukum, peran dan andil Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan menjadi sangat penting terutama dalam melaksanakan tugas dan fungsi di wilayah. Dalam kondisi demikian, kinerja birokrasi pemerintah yang unggul menjadi suatu keharusan serta selalu menjadi perhatian publik.

Untuk memandu pencapaian visi dan misi serta untuk mewujudkan tujuan dan sasaran diperlukan nilai-nilai yang digunakan sebagai pedoman bagi seluruh pegawai Kementerian Hukum, termasuk pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan. Adapun nilai-nilai tersebut adalah PASTI yang merupakan akronim dari Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan, dan Inovatif.

Dalam rangka mewujudkan akuntabilitas pelaksanaan Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2026 pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan, dibutuhkan laporan pertanggungjawaban yang dalam hal ini adalah Laporan Monitoring dan Evaluasi Mandiri (self assessment) atas pelaksanaan Capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2026.

2. Maksud dan Tujuan

1) Mempercepat pelaksanaan implementasi akuntabilitas kinerja organisasi dan akuntabilitas kinerja anggaran, serta pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Hukum;
2) Meningkatkan kualitas dukungan manajemen, pembentukan regulasi, serta pelayanan dan penegakan hukum;
3) Mendorong tercapainya program prioritas nasional di lingkungan Kementerian Hukum;
4) Sebagai implementasi pertanggungjawaban Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2026 Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan.

3. Ruang Lingkup

Ruang lingkup laporan ini adalah capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2026 Kantor Wilayah selama Tahun 2026.

4. Dasar Hukum

1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembar Negara Nomor 4700);
2) Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 80);
3) Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangkah Menengah Nasional Tahun 2020 - 2024 (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 10);
4) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 155 Tahun 2024 tentang Kementerian Hukum Republik Indonesia;
5) Peraturan Menteri Hukum Republik Indonesi Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum;
6) Peraturan Menteri Hukum Republik Indonesia Nomer 2 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum.
7) Keputusan Menteri Hukum Nomor M.HH-4.OT.01.01 Tahun 2026 tentang Rencana Aksi Atas Perjanjian Kinerja Tahun 2026.

B. KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan telah melaksanakan Rencana Aksi Perjanjian Kinerja. Adapun rincian kegiatan yang telah dilaksanakan untuk mendukung tercapainya Perjanjian Kinerja pada Tahun 2026 adalah sebagai berikut.

RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM SUMATERA SELATAN TRIWULAN I
TAHUN 2026

No	Sasaran Kegiatan Perubahan	Indikator Kinerja Kegiatan Perubahan	Target	Alokasi Anggaran	Rencana Aksi Triwulan I	Data Dukung
	Sekretariat Jenderal					
1	Terwujudnya tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK	Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK	100%	1.208.000	• Melaksanakan pembahasan tindak lanjut hasil temuan pemeriksaan BPK RI atas laporan keuangan tahun 2025 yang belum selesai ditindaklanjuti	https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1tFfh1uQT87EBThygP2JlFX-82AMyilgz
2	Meningkatnya kepuasan unit eselon II terhadap layanan dukungan manajemen	Indeks kepuasan terhadap layanan dukungan manajemen	3,98 Indeks	18.162.386.000	• Melaksanakan monitoring dan evaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP) dan standar pelayanan • Melaksanakan survei kepuasan terhadap layanan dukungan manajemen/Indeks Layananan Kesekretariatan • Melaksanakan survei integritas, SPKP dan SPKAK • Melakukan Kerja Sama dengan Mitra Media untuk Peningkatan Citra Positif Kementerian Hukum • Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran (IKPA) • Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Penanganan Pengaduan • Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Kinerja atas Capaian Kinerja Triwulan • Melaksanakan Monitoring, Evaluasi dan Pengawasan Kearsipan Triwulan • Menyusun Laporan Kinerja (LKjIP) Tahun 2025 • Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Penerapan SPIP • Melaksanakan Pemantauan Manajemen Risiko Satuan Kerja • Melakukan Monitoring dan Evaluasi Kinerja Anggaran Triwulan IV Tahun 2025 • Melaksanakan Keprotokoleran • Melaksanakan Peliputan Kehumasan • Melaksanakan Pembayaran Gaji dan Tunjangan, serta Uang Lembur Pegawai • Melaksanakan Layanan Operasional dan Pemeliharaan Kantor	https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1zMopythTTxzogVZkr-HHhsKxOZuWDEmV

					• Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran • Melaksanakan Pembinaan dan Pengelolaan BMN Melaksanakan Pengelolaan dan Penyediaan Informasi Publik • Melaksanakan Administrasi Kepegawaian • Melaksanakan Evaluasi Mandiri AKIP oleh Tim Penilai Mandiri Kantor Wilayah	
	Total			**18.163.594.000**		
	AHU					
1	Meningkatnya Kualitas Pemahaman Masyarakat terhadap Layanan AHU di Wilayah	Tingkat Pemahaman Masyarakat terhadap Layanan AHU di Wilayah	3,22 Indeks	927.142.000	• Menyusun rencana diseminasi dan sosialiasi layanan AHU di wilayah tahun 2026 • Sosialisasi pelayanan AHU (perseroan perorangan) • Melakukan pengukuran tingkat pemahaman masyarakat terhadap layanan AHU di wilayah	https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1n45MMLeBjrUla250RgrCSy3VnStOTFC
2	Terwujudnya Penyelesaian Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Jabatan Notaris di Kantor Wilayah	Persentase Penyelesaian Laporan Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Perilaku Notaris dan Pelaksanaan Jabatan Notaris di Kantor Wilayah	98,20%	822.006.000	• Pembentukan tim percepatan penyelesaian pengaduan masyarakat dengan melibatkan seluruh MPD • penyusunan laporan penyelesaian pengaduan masyarakat	https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1QfIE5qUJstfmz6WGHnAvcZbAt9ZWVg9M
	Total			**1.749.148.000**		
	KI					
1	Meningkatnya Layanan pelindungan dan pemanfaatan Kekayaan Intelektual di wilayah	Tingkat kepatuhan layanan pelindungan dan pemanfaatan Kekayaan Intelektual di wilayah terhadap Standar Pelayanan	85%	60.000.000	• Melakukan identifikasi potensi jenis KI di daerah setempat yang memuat: a. Indentifikasi potensi KI personal meliputi merek, paten, DI, dan HC (mendata lagu daerah); b. Indentifikasi potensi KI komunal: IG, KIK, dan merek kolektif; dan c. Melakukan inventarisasi KDMP yang aktif di wilayah masing-masing (data berdasarkan https://merahputih.kop.id/); • Menyampaikan inventarisasi SOP layanan KI di wilayah; • Melakukan edukasi/ diseminasi terkait pelindungan kekayaan intelektual dan pendampingan pengajuan permohonan layanan kekayaan intelektual di wilayah, dimana laporan memuat informasi terkait: a. Jumlah audiens edukasi/ diseminasi di wilayah (dengan salah	https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1d36l6j-ZitJ6UuTFSofgODBFpmhMkqWa

					satu tema prioritas terkait paten dan royalti lagu/musik); b. Jumlah permohonan KI yang diajukan melalui pendampingan wilayah; dan c. Informasi peningkatan permohonan KI minimal 20% dibanding tahun 2025 pada periode yang sama; serta • Menyampaikan laporan pencatatan data informasi dan pengaduan di wilayah.	
2	Optimalnya Penanganan dan Penyelesaian Sengketa Hak Kekayaan Intelektual di kewilayahan	Persentase Pelanggaran Kekayaan Intelektual di Kewilayahan yang Selesai Ditangani	31%	364.604.000	• Mengidentifikasi potensi pelanggaran KI atau sengketa KI di wilayah (merek, hak cipta, paten, IG, dll) dan melaporkan aduan yang masuk kepada Direktorat Penegakan Hukum; • Melakukan kerjasama pemantauan pengawasan KI dengan instansi terkait (koordinasi awal dengan DJKI, APH dan pemangku kepentingan terkait); dan • Melakukan sosialisasi dan pendampingan pencegahan/ penanganan pelanggaran kekayaan intelektual.	https://drive.google.com/drive/u/2/folders/10v92feopzFcGuDnzlngkfOsVdbsVGcW9
3	Meningkatnya Maturitas Pengelolaan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual di Wilayah	Tingkat Maturitas Pengelolaan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual di Wilayah	2,5 Level	1.735.798.000	• Pembentukan tim pemenuhan maturitas pengelolaan pemanfaatan kekayaan intelektual di wilayah; • Rapat persiapan internal pengelolaan pemanfaatan kekayaan intelektual di wilayah; dan • Kantor Wilayah melakukan koordinasi dengan Pemerintah Daerah untuk mendorong kebijakan pengelolaan, pemanfaatan dan pelindungan KI di daerah yang memuat laporan terkait: a. Menyusun draft PKS antara Kanwil dan 100% Kab/Kota di wilayah masing-masing untuk mendorong penyusunan Perda KI di wilayah; b. Kantor Wilayah melakukan koordinasi dengan Perguruan Tinggi untuk mendorong penguatan kelembagaan dan optimalisasi layanan Sentra Kekayaan Intelektual sebagai unit pengelola kekayaan intelektual di lingkungan perguruan tinggi; c. Melaksanakan inventarisasi klaster perguruan tinggi berdasarkan Keputusan Direktur PPM Nomor 0968/C3/DT.05.00/2025 di wilayah masing-masing; dan d. Kantor Wilayah mengikuti sosialisasi ruang	https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1aw-x88AE9ptR9dkQs9Nplg_PPIdTvree

					lingkup PKS yang diselenggarakan oleh DJKI.	
	Total			2.160.402.000		
	PP					
1	Terwujudnya fasilitasi perencanaan dan perancangan Peraturan Perundang-Undangan daerah di wilayah	1. Persentase perencanaan Peraturan Perundang-Undangan di daerah yang difasilitasi oleh Kanwil Kementerian Hukum	100%	62.126.000	• Inventarisasi program legislasi (Prolegda) tahun 2026; • Penyusunan tim kerja Perancang Peraturan Perundang-undangan pada Kantor Wilayah; dan • Melaksanakan fasilitasi perencanaan peraturan perundang-undangan di daerah yang meliputi: a. Melakukan pelayanan terhadap fasilitasi perencanaan peraturan perundang-undangan tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota (Prolegda, penyusunan rancangan Perda kumulatif terbuka, dan penyusunan RPerda di luar Prolegda Provinsi,Kabupaten/Kota, Progsun Perkada Provinsi,Kabupaten/Kota); b. Koordinasi Ke Pemerintah Daerah; dan c. Fasilitasi Kantor Wilayah atas perencanaan peraturan perundang-undangan di daerah.	https://drive.google.com/drive/u/2/folders/17YZG4st8Z4dNJ5QMq-P0kZ7RUI8JjLgt
2		2. Persentase Perancangan Peraturan Perundang-Undangan di Daerah yang Difasilitasi oleh Kanwil Kementerian Hukum	100%	167.416.000	• Menyusun tim kerja dalam rangka pelaksanaan pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi rancangan peraturan daerah (Perda) dan rancangan peraturan kepala daerah (Perkada); • Melaksanakan fasilitasi perancangan peraturan perundang-undangan di daerah yang meliputi: a. Melaksanakan rapat harmonisasi Ranperda dan Ranperkada; b. Melaksanakan mediasi dan konsultasi Perda dan Perkada; c. Melaksanakan rapat koordinasi dengan instansi terkait; dan d. Melaksanakan koordinasi dalam rangka fasilitasi perancangan Perda dan Perkada.	https://drive.google.com/drive/u/2/folders/17YZG4st8Z4dNJ5QMq-P0kZ7RUI8JjLgt
				229.542.000		
	BPHN					
1	Terwujudnya Pelaksanaan Rencana Tindak Lanjut Hasil Analisis dan Evaluasi Pelaksanaan Perda	Persentase Hasil Analisis dan Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah yang Ditindaklanjuti oleh Pemda di Wilayah Kerja Kanwil	15%	25.026.000	• Pembentukan Tim Monev Tindak Lanjut Analisis dan Evaluasi Perda • Perumusan rekomendasi hasil Anlisis dan Evaluasi Perda yang harus ditindak lanjuti oleh Pemerintah Daerah. • Identifikasi pemangku kepentingan yang perlu dimonitoring dan dievaluasi.	https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1w3LjdGqABb5QYcslp07SYzMrYMbyX4xK

					• Rapat/Forum penyampaian hasil Analisis dan Evaluasi Perda pada pemangku kepentingan	
2	Meningkatnya Layanan Bantuan Hukum di Wilayah	Persentase Pemberian Bantuan Hukum secara Litigasi dan Non Litigasi	89%	938.483.000	• Pembentukan tim pengawas daerah pemberian bantuan hukum; dan • Koordinasi dan pemetaan kebutuhan layanan bantuan hukum untuk mendukung peningkatan layanan litigasi dan non-litigasi	https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1uEPs532P33w12vc3IzzlQ6RRi-U7EuFo
3	Terwujudnya Layanan Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum di Wilayah yang Berkualitas	Tingkat penyelesaian layanan pengelolaan dokumen dan informasi hukum nasional di wilayah	70%	11.024.000	• Mengikuti kegiatan sosialisasi/bimbingan teknis pembinaan dan penilaian kinerja anggota JDIHN • Koordinasi dan konsultasi dengan BPHN dalam rangka pelaksanaan sosialisasi tata cara pelaporan dan penilaian kinerja anggota JDIHN	https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1m473kKVqPMkHmqgG5AGcWVaMw4UitInx
4	Meningkatnya Pos Bantuan Hukum di Wilayah	Persentase pos bantuan hukum di wilayah yang terbentuk terhadap total desa//kelurahan	11%	119.380.000	• Koordinasi dan konsultasi dengan BPHN dalam rangka pelaksanaan sosialisasi tata cara pelaporan dan penilaian kinerja anggota JDIHN • Persiapan fasilitasi pembentukan dan/atau pelaksanaan pembinaan Posbankum; dan • Pengumpulan dan penyampaian data permasalahan hukum di wilayah.	https://drive.google.com/drive/u/2/folders/16-RMFNhC-sBYjO0kM5yMhlCgW9hcIKUn
	Total			**1.093.913.000**		
	BSK					
1	Ditindaklanjutinya Rekomendasi Strategi Kebijakan Hukum di Wilayah	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Strategi Kebijakan Hukum di Wilayah	95,5%	69.304.000	• Melakukan pembentukan tim kerja; dan • Melaksanakan rapat pembahasan isu/ permasalahan kebijakan dalam rangka analisis kebijakan di bidang hukum	https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1oWgOkL5BoJ4wcmmbBlvKAVw5r57r7apR
	Total			**69.304.000**		
				23.465.903.000		

C. HASIL YANG DICAPAI

Hasil yang dicapai dari Monitoring dan Evaluasi Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Triwulan I Tahun 2026 ini yaitu Kantor Wilayah Sumatera Kementerian Hukum Sumatera Selatan telah merealisasikan kegiatan berdasarkan Perjanjian Kinerja yang telah dibuat sebelumya, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel Realisasi Capaian dan Anggaran Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2026

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan

No	Sasaran Kegiatan Perubahan	Indikator Kinerja Kegiatan Perubahan	Target	Realisasi	Capaian	Anggaran	Realisasi Anggaran	%
	Sekrtearіat Jenderal							
1	Terwujudnya tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK	Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK	100%	100%	100.00%	1,208,000	-	0.00%
2	Meningkatnya kepuasan unit eselon II terhadap layanan dukungan manajemen	Indeks kepuasan terhadap layanan dukungan manajemen	3,98 Indeks	3,93 Indeks	98.74%	18,162,386,000	4,996,087,874	29.14%
	Total					**18,163,594,000**	**4,996,087,874**	**29.13%**
	AHU							
1	Meningkatnya Kualitas Pemahaman Masyarakat terhadap Layanan AHU di Wilayah	Tingkat Pemahaman Masyarakat terhadap Layanan AHU di Wilayah	3,22 Indeks	3,69 Indeks	114.6%	927,142,000	178,540,610	19.26%
2	Terwujudnya Penyelesaian Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Jabatan Notaris di Kantor Wilayah	Persentase Penyelesaian Laporan Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Perilaku Notaris dan Pelaksanaan Jabatan Notaris di Kantor Wilayah	98.20%	100%	101.83%	822,006,000	57,971,000	7.05%
	Total					**1,749,148,000**	**236,511,610**	**13.52%**
	KI							
1	Meningkatnya Layanan pelindungan dan pemanfaatan Kekayaan Intelektual di wilayah	Tingkat kepatuhan layanan pelindungan dan pemanfaatan Kekayaan Intelektual di wilayah terhadap Standar Pelayanan	85%	100%	117,65%	60,000,000	-	0.00%
2	Optimalnya Penanganan dan Penyelesaian Sengketa Hak Kekayaan Intelektual di kewilayahan	Persentase Pelanggaran Kekayaan Intelektual di Kewilayahan yang Selesai Ditangani	31%	nihil	100%	364,604,000	16,604,000	4.55%
3	Meningkatnya Maturitas Pengelolaan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual di Wilayah	Tingkat Maturitas Pengelolaan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual di Wilayah	2,5 Level	nihil	100%	1,735,798,000	122,155,623	7.04%
	Total					2,160,402,000	138,759,623	6.42%
	PP							

1	Terwujudnya fasilitasi perencanaan dan perancangan Peraturan Perundang-Undangan daerah di wilayah	1. Persentase perencanaan Peraturan Perundang-Undangan di daerah yang difasilitasi oleh Kanwil Kementerian Hukum	100%		100%	62,126,000	-	0.00%
2		2. Persentase Perancangan Peraturan Perundang-Undangan di Daerah yang Difasilitasi oleh Kanwil Kementerian Hukum	100%		100%	167,416,000	34,465,200	20.59%
	Total					**229,542,000**	**34,465,200**	**15.01%**
	BPHN							
1	Terwujudnya Pelaksanaan Rencana Tindak Lanjut Hasil Analisis dan Evaluasi Pelaksanaan Perda	Persentase Hasil Analisis dan Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah yang Ditindaklanjuti oleh Pemda di Wilayah Kerja Kanwil	15%	0%	0%	25,026,000	7,009,900	28.01%
2	Meningkatnya Layanan Bantuan Hukum di Wilayah	Persentase Pemberian Bantuan Hukum secara Litigasi dan Non Litigasi	89%	16.10%	18.09%	938,483,000	155,124,900	16.53%
3	Terwujudnya Layanan Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum di Wilayah yang Berkualitas	Tingkat penyelesaian layanan pengelolaan dokumen dan informasi hukum nasional di wilayah	70%	5.56%	7.94%	11,024,000	-	0.00%
4	Meningkatnya Pos Bantuan Hukum di Wilayah	Persentase pos bantuan hukum di wilayah yang terbentuk terhadap total desa//kelurahan	11%	100%	909%	119,380,000	13,787,000	11.55%
	Total					**1,093,913,000**	**175,921,800**	**16.08%**
	BSK							
1	Ditindaklanjutinya Rekomendasi Strategi Kebijakan Hukum di Wilayah	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Strategi Kebijakan Hukum di Wilayah	95.5%	0%	0.00%	69,304,000	16,205,960	23.38%
	Total					**69,304,000**	**16,205,960**	**23.38%**
	Jumlah					**22,450,583,000**	**5,597,952,067**	**24.93%**

- **HAMBATAN**

Dalam pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Mandiri *(self assesment)* Triwulan I atas pelaksanaan Capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2026 Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan telah maksimal dalam melaksanakan Perjanjian Kinerja dan pelaksanaan kinerja anggaran sampai dengan Triwulan I. Seluruh rencana aksi yang ditetapkan untuk triwulan I telah dilaksanakan. Kantor Wilayah Sumatera Selatan telah melaksanakan langkah-langkah rencana aksi dalam mencapai target Perjanjian Kinerja Tahun 2026. Berbagai usaha dilakukan agar target-target pada setiap indikator kinerja kegiatan dapat tercapai.

Adapun hambatan dalam pelaksanaan rencana aksi perjanjian kinerja triwulan I tahun 2026 pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan yaitu berubah rencana kegiatan yang disebabkan oleh berbenturannya agenda kegiatan dengan divisi lain, hal ini menyebabkan adanya terjadinya ketidaksesuaian pada rencana penarikan dana yang sudah ditetapkan.

Terhadap Rencana Aksi tersebut, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan telah melakukan Monitoring dan Evaluasi Mandiri Triwulan I atas pelaksanaan Capaian Rencana Aksi Percepatan Perjanjian Kinerja Tahun 2026 pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan. Seluruh bagian pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan telah melaksanakan Rencana Aksi sesuai dengan timeline Triwulan I. Meski adanya hambatan kegiatan yang berubah jadwal tidak merubah target Triwulan I dan hanya menggeser kegiatan bulanan.

D. SIMPULAN DAN REKOMENDASI

1. Kesimpulan

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan telah melakukan Monitoring dan Evaluasi Triwulan I atas pelaksanaan Capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2026 di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan. Pada Tahun 2026 ini, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan telah melaksanakan Rencana Aksi

dan seluruh indikator pada Perjanjian Kinerja Perubahan tercapai sesuai dengan target**.** Implementasi berbagai kegiatan aksi sesuai rencana telah terlaksana dengan baik, meskipun terdapat sejumlah kendala.

2. Rekomendasi

Untuk pelaksanaan Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2026 pada Triwulan I agar kiranya pengampu Rencana Aksi masing-masing bagian menyusun dan memperhatikan pelaksanaan capaian Rencana Aksi sesuai dengan Perjanjian Kinerja yang telah dibuat dan ditetapkan. Di samping itu, pemangku kegiatan di setiap bagian untuk lebih mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya dan anggaran melalui penyelarasan perencanaan kerja dengan anggaran serta kontrol administrasi keuangan. Diperlukan koordinasi yang intensif dengan berbagai *stakeholder* khususnya Unit Eselon I agar dapat mengoptimalkan pelaksanaan Capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2026 pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan.

D. PENUTUP

Laporan ini dibuat sebagai bahan Evaluasi Mandiri (*Self Assessment*) untuk meningkatkan kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan pada tahun-tahun berikutnya berdasarkan Perjanjian Kinerja yang telah dibuat dan sesuai dengan realisasi anggaran. Rencana tindak lanjut pada periode berikutnya yaitu melaksanakan rencana aksi yang telah disusun dengan memperhatikan kendala-kendala yang dihadapi pada bulan-bulan sebelumnya demi tercapainya tujuan organisasi secara optimal.

Demikian disampaikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di Palembang

Pada tanggal 15 April 2026

Kepala Kantor Wilayah,

Maju Amintas Siburian

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi